

ABSTRAK

JENI ARIYANI

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan pembayaran hak anggota koperasi setelah disepakatinya perjanjian damai Dari ketentuan Pasal 66 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut, yang merupakan modal sendiri koperasi adalah setoran pokok, sertifikat modal, dan hibah. Akibat hukum atas tindakan pemaksaan pembayaran oleh anggota koperasi setelah disepakatinya perjanjian perdamaian. Saat melakukan perjanjian, keadaan memaksa tidak dapat secara langsung menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Pertimbangan hakim atas tindakan pemaksaan pembayaran hak anggota koperasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023 Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum Dalam perkara *a quo* Vini Noviani,S.S.,S.H., yang mengaku bertindak selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.

Disimpulkan bahwa Dengan adanya dana cadangan yang merupakan kumpulan sisa hasil usaha tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dipergunakan untuk cadangan, maka dana cadangan tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama tanpa pengaruh oleh perubahan modal anggota, karena penguduran diri seseorang atau sejumlah anggota. Perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat klausula keadaan memaksa yang ditentukan oleh para pihak. Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan tentang keadaan memaksa maka isi perjanjian dapat disimpangi. pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pembayaran, Koperasi

ABSTRACT

JENI ARIYANI

Cooperatives are associations of people who join and carry out joint business based on the principles of Cooperatives, so as to obtain greater benefits at low costs through companies owned and democratically controlled by their members. Cooperatives aim to improve the social and economic conditions of their members compared to before joining the Cooperative.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Regulation of payment of cooperative member rights after the agreement of a peace agreement From the provisions of Article 66 of Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives, the cooperative's own capital is the principal deposit, capital certificate, and grant. Legal consequences for coercive payment by cooperative members after the agreement of a peace agreement. When making an agreement, force majeure cannot directly be a reason to cancel the agreement. Judge's considerations on the act of forcing payment of cooperative member rights in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3691 K/Pdt/2023 The reasons for the cassation cannot be justified, in this case the High Court which upheld the District Court's decision did not apply the law incorrectly In the a quo case of Vini Noviani, S.S., S.H., who claimed to act as the Chairperson of the Sejahtera Bersama Savings and Loan Cooperative.

It is concluded that with the existence of a reserve fund which is a collection of remaining business results that are not distributed to members, but are used for reserves, the reserve fund can be used to realize common goals without being influenced by changes in member capital, due to the resignation of one or a number of members. It must first be ensured that the agreement contains a force majeure clause determined by the parties. If the agreement stipulates force majeure, the contents of the agreement can be deviated from. the above considerations, it turns out that the decision of the Judex Facti/Banten High Court in this case does not conflict with the law and/or statutes, so the cassation application filed by the Cassation Applicant must be rejected

Keywords: Unlawful Acts, Payment, Cooperatives